

Politik Pendidikan: Studi Tentang Pendidikan Anak Usia Dini – Pos Paud Terpadu (Paud - PPT) Kota Surabaya

Asri Wijayanti*

ABSTRAK

Pendidikan begitu penting dalam kehidupan kita. Apalagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang merupakan gerbang awal memasuki pendidikan. Dengan maraknya tuntutan para orang tua mengenai program pendidikan tersebut, karena dirasa biaya masuk play group swasta terlalu mahal, maka pemerintah kota Surabaya turun tangan. Pemkot mengeluarkan kebijakan tentang PPT (Pos PAUD Terpadu) yang masuk dalam kategori PAUD sejenis (Similar With Play Group). Dibawah koordinasi Tim Penggerak PKK Kota Surabaya, Dinas Pendidikan, Bappemas KB, dan Dinas Kesehatan Surabaya.

Dalam rangka menyelenggarakan pendidikan, pemerintah harus benar-benar menuangkan amanat UUD 1945 ke dalam langkah yang lebih konkret, karena di zaman modern seperti sekarang ini, pendidikan selalu dikaitkan dengan persoalan yang lebih luas. Pendidikan dipandang sebagai investasi, instrumen yang efektif untuk mewariskan ideologi, kekuatan pengaruh, dan bahkan juga menjadi instrumen untuk mendapatkan keuntungan material. Oleh sebab itu, pendidikan selalu diperebutkan oleh berbagai pihak kepentingan politik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif, data yang diperoleh dievaluasi secara kualitatif dalam bentuk penggambaran detail dan komprehensif untuk mendapatkan pengertian di balik data-data yang tersaji. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam menjelaskan pertanyaan penelitian dengan menggunakan Teori New Public Service, serta mengkerangkakan konsep Politik Pendidikan, Lembaga Politik, Lembaga Pendidikan, dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pendidikan Anak Usia Dini – Pos PAUD Terpadu perlu diselenggarakan karena merupakan rancangan dan tuntutan masyarakat yang harus dilayani oleh pemerintah sebagai penyedia layanan public. Disisi lain, PAUD – PPT digunakan sebagai media sarana kepentingan politik oleh pemerintah dan lembaga politik itu sendiri. Hambatan yang ditemui pemerintah bahwa ternyata PAUD - PPT juga dijadikan kepentingan dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain, seperti partai politik dan calon-calon legislative untuk meraih suara dalam pemilu. Upaya pemerintah dengan kembali lagi meningkatkan anggaran dan kualitas bagi penyelenggaraan Pos PAUD Terpadu.

Kata Kunci: Pendidikan Anak Usia Dini – Pos PAUD Terpadu (PAUD - PPT), Kepentingan Politik, Lembaga Politik

* Mahasiswa S 1 Ilmu Politik FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya

Latar Belakang Masalah

Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian-bagian yang terpisah, yang satu sama lain tidak memiliki hubungan apa-apa. Padahal, keduanya bahu-membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara. Lebih dari itu, keduanya satu sama lain saling menunjang dan saling mengisi.

Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di negara tersebut. Begitu juga sebaliknya, lembaga-lembaga dan proses politik di suatu negara membawa dampak besar pada karakteristik pendidikan di negara tersebut. Ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan dan politik di setiap negara.

Melalui control negara yang kuat terhadap kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik pendidikan, maka tidaklah sulit bagi negara untuk memposisikan pendidikan sebagai fungsi negara. Fungsi ini dapat dilihat pada eratnya keterkaitan antara elemen-elemen pendidikan public di satu negara dengan prinsip-prinsip yang berlaku di negara tersebut.

Pendidikan begitu penting dalam kehidupan kita, apalagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang merupakan gerbang awal memasuki pendidikan. Di zaman yang penuh tantangan sekarang ini, banyak sekali orang tua yang tidak punya waktu untuk memperhatikan kebutuhan anaknya, dari kebutuhan lahir maupun batin. Mereka sangat sibuk mencari uang namun ternyata penghasilannya tetap tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. (Hariwijaya, M: 2011)

Menurut data resmi yang dihimpun dari 33 Kantor Komnas Perlindungan Anak (PA) di 33 provinsi, jumlah anak putus sekolah pada tahun 2007 sudah mencapai 11,7 juta jiwa. Dan jumlah itu pasti akan bertambah mengingat banyak sekali permasalahan perekonomian yang melanda bangsa kita ini. Dengan latar belakang pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia maka pemerintah berinisiatif untuk melakukan pendidikan non formal sebelum usia 6 tahun. Sebab menurut ahli psikologi perkembangan usia 0-6 tahun adalah masa the golden age atau masa emas dalam tahapan perkembangan hidup manusia seutuhnya. Masa emas yang dimaksud bahwa pada masa ini tidak kurang dari 100

miliar sel otak siap untuk dirangsang agar kecerdasan seseorang dapat berkembang secara optimal. 6 tahun pertama adalah masa-masa paling penting dan menentukan dalam membangun kecerdasan anak dibanding masa sesudahnya. Artinya jika

anak mendapat rangsangan yang maksimal maka potensi tumbuh kembang anak akan terbangun secara maksimal.

Lalu ditinjau dari sejarahnya, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia mulai diperhatikan oleh pemerintah secara sungguh-sungguh dan mencakup rentang usia 0-6 tahun sejak tahun 2002. Dengan demikian pengembangan PAUD yang mencakup rentang usia 0-6 tahun secara nasional baru berjalan selama 7 tahun. Namun karena pemahaman dan kemauan masyarakat selama ini sudah sangat bagus, sehingga hanya dalam kurun waktu 7 tahun Angka Partisipasi Kasar APK-PAUD sudah mencapai 15,3 juta (53,6%). Saat ini PAUD sudah menjadi Gerakan Masyarakat Secara Nasional (National Public Movement) masyarakat sehari-hari sudah terbiasa membicarakan pentingnya PAUD bagi masa depan putra-putrinya.

Sampai saat ini masih ada beberapa masalah yang dapat menghambat perluasan kesempatan dan pemerataan akses mengikuti PAUD serta peningkatan mutu PAUD di Indonesia, namun semua itu kita anggap sebagai tantangan yang menarik sehingga untuk mengatasinya diperlukan kreativitas dan inovasi yang berkelanjutan. Pada tahun 2004 tercatat bahwa jumlah APK-PAUD baru mencapai 12,7 juta (27%) dan tahun 2008 APK-PAUD telah mencapai 15,1 juta (50,6%) serta diharapkan pada tahun 2009 akan mencapai 15,3 juta (53,6%). Berdasarkan kondisi tersebut pemerintah telah menetapkan rencana 5 tahun ke depan APK-PAUD diharapkan mencapai 21,3 juta (72,6%).

Dibanding dengan perkembangan model dan jenis PAUD di berbagai negara maju dan berkembang lainnya, PAUD di Indonesia memiliki keunikan khusus yang agak berbeda dengan di luar negeri. Karena di luar negeri PAUD pada umumnya hanya dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu Kindergarden atau Play Group dan Day Care, sedang di Indonesia menjadi 4 (empat) macam yaitu, Taman Kanak-Kanak (Kindergarten), Kelompok Bermain (Play Group), Taman Penitipan Anak (Day Care),

PAUD sejenis (Similar with Play Group).

Penyelenggaraan PAUD di negara lain semata-mata hanya menstimulasi kecerdasan anak secara komprehensif dan pengasuhan terhadap anak, karena aspek kecerdasan yang dikembangkan hanya meliputi kecerdasan intelektual, emosional, estetika, dan social serta pengasuhan. Sedang di Indonesia potensi kecerdasan tersebut diberikan juga pendidikan untuk mengembangkan potensi kecerdasan spiritual yang dilaksanakan melalui pendekatan olah pikir, olah rasa, dan olah raga. Di samping itu, juga diberikan pengetahuan dan pembinaan terhadap kondisi kesehatan dan gizi peserta didik. Oleh karena itu, penyelenggaraan PAUD di Indonesia disebut penyelenggaraan PAUD secara holistik dan integrative.

Di kota besar seperti Surabaya, Orang tua akan merasa bangga jika anak-anaknya yang masih berada di Kelompok Bermain atau TK sudah mampu membaca dan menulis. Tidak jarang kemampuan membaca dan menulis yang dimiliki oleh anak TK atau bahkan anak-anak dalam Kelompok Bermain dijadikan ukuran kualitas sebuah Kelompok Bermain atau TK. Dan pada akhirnya ukuran kepandaian menulis dan membaca ini akan mempengaruhi popularitas Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak. Untuk mengoptimalkan fungsi PAUD untuk mengembangkan semua aspek perkembangan anak, meliputi aspek perkembangan kognitif, bahasa, fisik (motorik kasar dan halus), sosial dan emosional. Maka guru PAUD seharusnya mempunyai dua kompetensi yang saling terintegrasi, yaitu kompetensi akademik dan kompetensi profesional. Karena merekalah yang menjadi pengganti orang tua si anak dan juga sebagai pendamping dan menjalin komunikasi yang positif dengan orangtua/pengasuh si anak.

Di Surabaya juga sudah banyak pihak yang menawarkan metode pendidikan untuk anak-anak di usia dini, seperti taman bermain (play group). Di Surabaya ada sekitar 1070 kelompok bermain (pra sekolah) yang bukan dikelola oleh pemerintah. Dan kebanyakan para orang tua membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk menikmati fasilitas tersebut. Biaya rata-rata yang dikeluarkan para orang tua sekitar Rp. 100.000 hingga Rp. 450.000 per bulan. Biaya tersebut diluar ongkos seperti ekstrakurikuler, bahasa inggris, menari, dan kegiatan lainnya. Belum lagi kalau ada kegiatan perlombaan atau

tour. Tentu dengan biaya yang fantastis, fasilitas yang didapatkan pun cukup sesuai.

Dengan maraknya tuntutan para orang tua mengenai program pendidikan tersebut, karena dirasa biaya masuk play group swasta terlalu mahal, maka pemerintah kota Surabaya turun tangan. Pemkot mengeluarkan kebijakan tentang PPT (Pos PAUD Terpadu) yang masuk dalam kategori PAUD sejenis (Similar With Play Group). Dibawah koordinasi Tim Penggerak PKK Kota Surabaya, Dinas Pendidikan, Bappemas KB, dan Dinas Kesehatan Surabaya saat ini Surabaya sudah memiliki 825 Pos PAUD Terpadu. Pemerintah Kota Surabaya juga menyediakan anggaran tersendiri untuk Pos PAUD Terpadu setiap tahunnya. Meski kebijakan telah diterapkan, tapi masalah dari pemerintah tetap pada kualitas pendidikan, Seperti kurangnya skill dan tenaga pengajar Pos PAUD Terpadu.

Pembinaan anak secara utuh tidak hanya dapat dilaksanakan sendiri oleh orang tua, akan tetapi harus diintervensi dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya melalui kerjasama lembaga/lintas sektoral. Untuk membantu pemenuhan pertumbuhan dan kesehatan fisik anak dilakukan melalui program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), sementara untuk pembinaan tumbuh kembang anak balita melalui rangsangan fisik, mental, intelektual, spiritual, sosial dan emosional dilakukan dengan program Bina Keluarga Balita (BKB) dan program PAUD. Ketiga program tersebut diatas yaitu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Bina Keluarga Balita (BKB) dan PAUD harus dilaksanakan secara terintegrasi (terpadu), sehingga program pembinaan dan pengasuhan anak bagi keluarga yang memiliki bayi dan balita dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. (<http://jdih.surabaya.go.id-perwali-no.20:2008>)

Dalam UUD 1945 pasal 28C ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Sudah sangat jelas tentang kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan bagi warga negaranya dan pendidikan merupakan hak asasi manusia. Dan

juga undang undang no.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Dalam UU No.20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah "Suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan lebih lanjut." (pasal 1 butir 14). Dengan berpedoman UU No.20 tahun 2003 disebutkan bahwa PAUD dilaksanakan sebelum jenjang pendidikan dasar pada anak sejak lahir hingga usia kurang lebih enam tahun. Dalam hal ini Depdiknas membuat suatu kebijakan di bidang PAUD antara lain yaitu:

- Meningkatkan pemerataan dan akses layanan PAUD
- Meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing PAUD
- Meningkatkan Good Governance, akuntabilitas (transparansi), dan pencitraan yang positif di bidang PAUD

Jadi dalam rangka menyelenggarakan pendidikan, pemerintah harus benar-benar menuangkan amanat UUD 1945 ke dalam langkah yang lebih konkret, karena di zaman modern seperti sekarang ini, pendidikan selalu dikaitkan dengan persoalan yang lebih luas. Pendidikan dipandang sebagai investasi, instrumen yang efektif untuk mewariskan ideologi, kekuatan pengaruh, dan bahkan juga menjadi instrumen untuk mendapatkan keuntungan material. Oleh sebab itu, pendidikan selalu diperebutkan oleh berbagai pihak kepentingan. Pemerintah atau Negara sebagai akibatnya tidak saja secara murni menyelesaikan persoalan yang terkait dengan proses belajar mengajar, melainkan juga yang lebih rumit lagi adalah dihadapkan oleh persoalan yang terkait dengan bagaimana mengakomodasi berbagai kepentingan itu.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, penulis mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa kepentingan Pemerintah Kota Surabaya

terhadap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini – Pos PAUD Terpadu (PAUD - PPT)?

2. Apa yang menjadi hambatan dalam realisasi kepentingan Pemerintah Kota Surabaya terhadap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini – Pos PAUD Terpadu (PAUD - PPT)?

3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya untuk mengatasinya?

Teori New Public Service

Pemilik kepentingan publik yang sebenarnya adalah masyarakat maka administrator publik seharusnya memusatkan perhatiannya pada tanggung jawab melayani dan memberdayakan warga negara melalui pengelolaan organisasi publik dan implementasi kebijakan publik. Perubahan orientasi tentang posisi warga negara, nilai yang dikedepankan, dan peran pemerintah ini memunculkan perspektif baru administrasi publik yang disebut sebagai new public service. Warga negara seharusnya ditempatkan di depan, dan penekanan tidak seharusnya membedakan antara mengarahkan dan mengayuh tetapi lebih pada bagaimana membangun institusi publik yang didasarkan pada integritas dan responsivitas. Pada intinya, perspektif baru ini merupakan "*a set of idea about the role of public administration in the governance system that place public service, democratic governance, and civic engagement at the center*". (Denhardt, dan Denhardt:2004:23)

Perspektif new public service mengawali pandangannya dari pengakuan atas warga negara dan posisinya yang sangat penting bagi pemerintahan demokratis. Jati diri warga negara tidak hanya dipandang sebagai semata persoalan kepentingan pribadi (self interest) namun juga melibatkan nilai, kepercayaan, dan kepedulian terhadap orang lain. Warga negara diposisikan sebagai pemilik pemerintahan (owners of government) dan mampu bertindak secara bersama-sama mencapai sesuatu yang lebih baik. Kepentingan publik tidak lagi dipandang sebagai agregasi kepentingan pribadi melainkan sebagai hasil dialog dan keterlibatan publik dalam mencari nilai bersama dan kepentingan bersama. (Denhardt, dan Denhardt:2004:24)

Perspektif new public service

menghendaki peran administrator publik untuk melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan bertugas untuk melayani masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, administrator publik menyadari adanya beberapa lapisan kompleks tanggung jawab, etika, dan akuntabilitas dalam suatu sistem demokrasi. Administrator yang bertanggung jawab harus melibatkan masyarakat tidak hanya dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program guna mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Hal ini harus dilakukan tidak saja karena untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian, pekerjaan administrator publik tidak lagi mengarahkan atau memanipulasi insentif tetapi pelayanan kepada masyarakat. (Denhardt, dan Denhardt:2004:170)

Perspektif new public service dapat dilihat dari beberapa prinsip. Prinsip-prinsip tersebut adalah, pertama adalah *serve citizens, not customers*. Karena kepentingan publik merupakan hasil dialog tentang nilai-nilai bersama daripada agregasi kepentingan pribadi perorangan maka abdi masyarakat tidak semata-mata merespon tuntutan pelanggan tetapi justru memusatkan perhatian untuk membangun kepercayaan dan kolaborasi dengan dan diantara warga negara. Kedua, *seek the public interest*. Administrator publik harus memberikan sumbangsih untuk membangun kepentingan publik bersama. Tujuannya tidak untuk menemukan solusi cepat yang diarahkan oleh pilihan-pilihan perorangan tetapi menciptakan kepentingan bersama dan tanggung jawab bersama. Ketiga, *value citizenship over entrepreneurship*. Kepentingan publik lebih baik dijalankan oleh abdi masyarakat dan warga negara yang memiliki komitmen untuk memberikan sumbangsih bagi masyarakat daripada dijalankan oleh para manajer wirausaha yang bertindak seolah-olah uang masyarakat adalah milik mereka sendiri. Keempat, *think strategically, act democratically*. Kebijakan dan program untuk memenuhi kebutuhan publik dapat dicapai secara efektif dan bertanggungjawab melalui upaya kolektif dan proses kolaboratif. Kelima, *recognize that accountability is not simple*. Dalam perspektif ini abdi masyarakat seharusnya lebih peduli daripada mekanisme pasar. Selain itu, abdi masyarakat juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan, nilai-nilai

kemasyarakatan, norma politik, standar profesional, dan kepentingan warga negara. Keenam, *serve rather than steer*. Penting sekali bagi abdi masyarakat untuk menggunakan kepemimpinan yang berbasis pada nilai bersama dalam membantu warga negara mengemukakan kepentingan bersama dan memenuhinya daripada mengontrol atau mengarahkan masyarakat ke arah nilai baru. Ketujuh, *value people, not just productivity*. Organisasi publik beserta jaringannya lebih memungkinkan mencapai keberhasilan dalam jangka panjang jika dijalankan melalui proses kolaborasi dan kepemimpinan bersama yang didasarkan pada penghargaan kepada semua orang. (Denhardt, dan Denhardt:2004:42-43)

Kepentingan Pemerintah Kota Surabaya terhadap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini – Pos PAUD Terpadu (PAUD - PPT) Pendidikan Anak Usia Dini – Pos PAUD Terpadu (PAUD – PPT) sebagai program pemerintah kota Surabaya di bidang pendidikan

Pembangunan sumber daya manusia harus dimulai sejak dini, atau bahkan sejak janin dalam kandungan, karena pada saat itu proses pertumbuhan dan perkembangan manusia sudah mulai berlangsung. Untuk itu program Bina Keluarga Balita (BKB) dan Posyandu sebagai wadah kegiatan keluarga yang mempunyai anak balita menjadi sangat penting, karena merupakan upaya untuk meningkatkan pemberdayaan orang tua dan anggota keluarga lain dalam meningkatkan kemampuan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Di kota Surabaya, melalui peraturan walikota (perwali) nomor 20 tahun 2008 telah diatur tentang pengintegrasian program PAUD, BKB, dan Posyandu yang keseluruhan kegiatan tersebut disatukan menjadi suatu program yaitu Pos PAUD Terpadu (PPT). Yang diwakili oleh masing-masing lembaga pemerintahan yaitu PAUD dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya dibantu oleh Tim Penggerak PKK Kota Surabaya, BKB dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemmas KB), dan Posyandu dari Dinas Kesehatan. Keseluruhan program diintegrasikan menjadi satu guna menghasilkan generasi yang berkualitas.

Perkembangannya juga sangat luar biasa, PAUD – PPT sedang marak-maraknya di tahun 2004 dan sampai saat ini jumlahnya telah mencapai 629 tempat menurut data yang didapat dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Tersebar merata ke 168 kelurahan di 31 kecamatan. Kalaupun ada kelurahan yang tidak memiliki PPT itu hanya RW-RW yang elit saja. Pemerintah Kota Surabaya terus mencoba memfasilitasi karena Pendidikan Anak Usia Dini merupakan suatu jalan untuk mempersiapkan anak didik ke jenjang berikutnya. Pemerintah Kota Surabaya akan terus bergerak untuk mendorong dan melanjutkan pendirian pos-pos PAUD Terpadu. PAUD merupakan investasi masa depan, dan generasi penerus akan sangat ditentukan oleh pola pendidikan anak sejak dini.

Kepentingan Pemerintah Kota Surabaya dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini – Pos PAUD Terpadu (PAUD – PPT)

Disini ada empat lembaga pemerintahan yang berperan langsung dalam proses penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini – Pos PAUD Terpadu (PAUD – PPT) yaitu, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemmas KB), Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Tim Penggerak PKK Kota Surabaya, dan Dinas Kesehatan. Masing-masing lembaga memiliki fungsi, peranan, dan kepentingannya masing-masing.

Berdasarkan wawancara kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB (Bapemmas dan KB) jika dikaitkan dengan fungsi dan peran, peran Bapemmas dan KB sebagai pengayom, pembina. Tetapi lebih kepada pembinaan. Pembentukan Pos PAUD Terpadu (PPT) yang menjadi sponsor sesungguhnya dari Bapemmas dan KB. Pertimbangannya yaitu karena masyarakat kalangan kelas menengah kebawah tidak semuanya terakomodir untuk bisa masuk ke jalur pendidikan formal. Bagaimana agar bisa terakomodir untuk itu kaitannya dengan peraturan walikota no 20 tahun 2008. Jadi peraturan itu lebih pada pelaksanaan Pos PAUD Terpadu itu secara umum. Dan masyarakat bisa mengetahui jika pelaksanaan dan penyelenggaraan Pos PAUD Terpadu (PPT) itu ada perlindungan hukumnya.

Bapemmas sudah bekerja ikut menangani Pos PAUD Terpadu sebelum ada peraturan walikota nomor 20 tahun 2008. Namun sejatinya peraturan walikota tersebut hanya sebagai penguat di masyarakat bahwa kegiatan mereka itu ada landasan hukumnya. Karena dalam Pos PAUD Terpadu itu ada tiga kegiatan

yang dilaksanakan didalamnya, yaitu kegiatan PAUD itu sendiri, Posyandu, dan BKB. Dalam operasionalnya keterpaduan itu muncul dimana tergantung kebutuhan masyarakatnya sendiri. Dari sisi praksis lebih kecenderungan dimana baiknya memperpadukan beberapa program tersebut. Bapemmas sendiri sudah berkecimpung dalam Pos PAUD Terpadu sejak 6 bulan setelah program BKB itu berdiri sempat program itu mati suri, karena persoalannya setelah kelompok BKB itu dibentuk ternyata tidak ditunjang dengan pembiayaannya, sehingga Bapemmas berusaha mencari terobosan baru bagaimana agar program BKB ini bisa jalan kembali, harus dipadukan dengan kegiatan apa. Karena BKB itu minimal 1 kali perbulan maka bisa dipadukan dengan Posyandu, atau bisa juga dipadukan dengan Pos PAUD Terpadu karena PAUD itu melaksanakan kegiatan satu minggu 2 sampai 3 kali. Bapemmas termasuk lembaga pemerintahan yang berusaha untuk memunculkan kebijakan tersebut, menjadi peraturan walikota, dan mungkin itu hanya satu di Indonesia.

Karena banyak permintaan masyarakat yang tidak diakomodir oleh pemerintah, karena diantaranya penduduk Surabaya juga masih ada yang dari keluarga miskin, orang tua untuk memasukkan anak kedalam TK atau Kelompok Bermain saja mereka tidak ada uang. Salah satu solusinya yaitu kelompok bermain yang non formal. Yang non formal ini yang akan dikembangkan dengan harapan bahwa dengan adanya kegiatan itu setiap kali pertemuan, setiap mereka datang itu infaqnya berapa, itu semua tergantung dari kesepakatan masyarakat sendiri. Yang jelas jika Pos PAUD Terpadu itu akan diselenggarakan harus ada pengajar dulu bunda-bundanya, lalu anak didiknya berapa banyak, didukung oleh tokoh masyarakat setempat, kalau itu tidak didukung jelas cuma jalan sebentar lalu kemudian bubar. Tapi sepanjang ini perkembangan di kota Surabaya sangat luar biasa.

Alasan yang utama bahwa Bapemmas ingin menciptakan anak-anak Surabaya yang cerdas, dan itu termasuk misi dari pemerintah Kota Surabaya. Untuk merealisasikan kegiatan yang dilakukan adalah dengan ini, itu menjadi motivasi dasarnya. Memang bidang KB dan KS lebih berkecimpung pada kegiatan BKB-nya, namun jika kegiatan BKB itu harus memanggil para ibu-ibu berulang-ulang mereka juga

banyak pekerjaan yang harus dilakukan, sehingga lebih baik para orang tua ibu-ibu khususnya digandeng sehingga bisa sekali pertemuan dalam dua kegiatan dilakukan, seperti kegiatan Pos PAUD Terpadu mereka datang, anak-anak masuk kelas, lalu ibu-ibu nya menunggu, disaat itu mereka dipanggil dan dibina oleh kader. Itu salah satu bentuk strateginya.

Tim Penggerak PKK Kota Surabaya juga salah satu lembaga yang sangat support sekali dalam penyelenggaraan Pos PAUD Terpadu. Lembaga tersebut juga merupakan fasilitator dalam program tersebut. Data yang masuk di Tim Penggerak PKK Kota Surabaya sampai saat ini sudah ada sekitar 853 Pos PAUD Terpadu yang ada di kota Surabaya. Pos PAUD Terpadu mulai aktif tahun 2006, karena pada waktu Ibu Diah Katarina selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya mengharapkan harus ada satu Pos PAUD Terpadu di setiap kelurahan dan di setiap kecamatan. Lalu sebagai langkah awal Tim Penggerak PKK dari pokja 2 memberikan penyuluhan, masukan, kepada kelurahan dan kepada kecamatan pentingnya menyelenggarakan Pos PAUD Terpadu ini.

Sebelum peraturan walikota nomor 20 tahun 2008 terbit, Tim Penggerak PKK Kota Surabaya sudah halo-halo kebawah untuk mewajibkan harus ada satu Pos PAUD Terpadu di setiap kelurahan dan kecamatan. Karena ini juga merupakan program Tim Penggerak PKK Kota Surabaya dari pokja 2 yaitu pendidikan keterampilan dan pengembangan kehidupan berkoperasi maka upayanya adalah motivasi dan sosialisasi. Dengan modal nekat walau bukan guru ini para kader-kader Tim Penggerak PKK Kota yang mengajar di kelompok-kelompok Pos PAUD Terpadu. Kader-kader PKK bervariasi latar belakang pendidikannya, ada yang SMA, SMP, bahkan ada pula yang SD, tetapi mereka sangat antusias sekali dengan adanya program Pos PAUD Terpadu.

Tim Penggerak PKK Kota Surabaya memiliki tanggung jawab karena mereka yang mewajibkan untuk adanya penyelenggaraan Pos PAUD Terpadu tersebut, dan guru-gurunya pun masih belum memenuhi standart yang diterapkan maka diadakan pelatihan-pelatihan yang di fasilitasi oleh Tim Penggerak PKK kota Surabaya. Kader-kader itu diberi pelatihan dan pengembangan. Setelah kegiatan itu berlangsung sejak 2004 dan aktif di tahun 2006 baru pada

tahun 2007 pemerintah merespon kegiatan tersebut. Dan ketika Tim Penggerak PKK Kota turun ke kelurahan-kelurahan, ke kecamatan, untuk berbicara mengenai Pos PAUD Terpadu pemerintah khususnya Dinas Pendidikan masih belum tahu apapun.

Pemerintah menyiapkan anggaran tersendiri untuk Pos PAUD Terpadu setelah terbitnya peraturan walikota nomor 20 tahun 2008. Antara lain dana insentif untuk bunda PAUD satu orang 25 ribu rupiah dan sekarang sudah menjadi 50 ribu setiap bulan yang diterimakan setiap 6 bulan. Biaya operasional juga sebesar 150 ribu rupiah, tetapi sudah dihapuskan dana operasional tersebut.

Sebenarnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan program dari pemerintah pusat. Pemerintah itu sudah menggaris bawahi bahwa pendidikan untuk anak usia dini menjadi fokus utama. Namun diantara lembaga-lembaga pemerintah yang ada memang untuk pertama kalinya Tim Penggerak PKK Kota yang paling merespon program tersebut. Karena Tim Penggerak PKK ini menangani dari balita (PAUD) sampai tua (Dasawisma). Sedangkan pada saat perkumpulan dasawisma itu juga selalu banyak anak kecil, dan anak-anak itu masalah yang dijangkau hanya pada masalah kesehatan dan pola pengasuhan, sedang pendidikan dan perkembangan anaknya itu belum ditangani. Dan banyak anak di usia 0-6 tahun itu adalah masa emas mereka untuk menerima pendidikan tetapi oleh pemerintah belum ditangani. Padahal ini adalah masa baik-baiknya untuk anak menerima masukan berupa pengetahuan atau pengenalan. Oleh karena itu Tim Penggerak PKK tergerak membentuk kelompok-kelompok PAUD tersebut karena memang kader-kader Tim Penggerak PKK sampai ke dasawisma. 'Kalau misalnya kegiatan ini ditangani Dinas Pendidikan ini yang disuruh mengajar siapa, mereka tidak punya kader. Walaupun perintahnya dari Dinas Pendidikan langsung ya pasti harus bayar kan? Sedangkan ibu-ibu ini tidak dibayar, sekarang saja ada insentif dari pemerintah dulu awal-awal ya tidak ada' kata Ibu Kasbunadi selaku ketua Pokja 2 Tim Penggerak PKK Kota Surabaya.

Setiap kali pertemuan belajar-mengajar di Pos PAUD Terpadu diwajibkan membayar infaq sebesar seribu rupiah, ada juga yang 2 ribu rupiah. Lalu berkembang melalui sosialisasi kalau bisa jangan ditarik setiap datang, setiap

bulan saja 10 ribu rupiah atau 20 ribu rupiah. Jika biaya itu dinaikkan pada akhirnya anak tidak disekolahkan oleh orang tuanya, itu salah satu masalah yang sering muncul. Dikarenakan mereka keberatan. Jadi pengetahuan tentang Pendidikan Anak Usia Dini sebetulnya sangat diperlukan bagi orang tua khususnya ibu-ibu, maka terus dilakukan sosialisasi, pelatihan-pelatihan kepada bunda-bunda, kader-kader untuk menyampaikan betapa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.

Sementara itu, waktu pertama kali Tim Penggerak PKK Kota Surabaya mendirikan Pos PAUD Terpadu mereka terkesan seadanya, pengajarannya pun masih di lantai. Memang mereka menganjurkan kepada kader-kader untuk tidak perlu menunggu sampai punya bangku, punya kursi. Karena anak-anak ini sudah sangat membutuhkan pendidikan tersebut. Kalau memang ada tikar ya tikar, di lantai ya lantai. Jadi pada saat itu pernah Bapak Sahudi Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya sewaktu itu sidak, beliau heran lo ini apa sekolah kok seperti ini. Berarti pak sajudi itu belum miengetahui yang sebenarnya seperti apa. Kalau menunggu sampai pemerintah memberi bangku, memberi buku, tentu tidak jalan kegiatan ini sementara anak ini semakin lama semakin besar. Di TK itu harus membayar biaya-biaya seperti uang pangkal, lalu kalau orang yang tidak punya bagaimana. Memang tujuannya Pos PAUD Terpadu itu untuk orang tua yang kurang mampu, yang tidak dapat menyekolahkan anaknya di kelompok bermain, di TK yang biayanya sangat mahal.

Dalam penyelenggaraannya Pos PAUD Terpadu memang banyak mendapat cercaan, sekolah apa PAUD itu sekolah ecek-ecek. Yang penting bukan ecek-ecknya melainkan sosialisasinya untuk anak yang memang sudah masanya bisa menerima banyaknya pengenalan warna, pengenalan bentuk, bisa bersosialisasi dengan teman-temannya itu yang diberikan di Pos PAUD Terpadu.

Tapi Pemerintah sekarang juga sudah memberi perhatian pada Pos PAUD Terpadu setelah adanya insentif, lalu juga dengan memberikan buku-buku pembelajaran. Yang tadinya buku-buku petunjuk pembelajaran pun dari Tim Penggerak PKK yang membuat dan menyusun. Mulai dari buku induk, buku absen, buku pembelajaran anak usia 2-3 tahun, dan pembelajaran anak 3-4 tahun. Semua buku-

buku penilaian juga dari Tim Penggerak PKK, dari Dinas Pendidikan waktu itu masih belum ada. Karena kebetulan ada anggota dari Tim Penggerak PKK Ibu Dewi namanya yang menguasai pendidikan TK, Ibu Dewi ini memang sudah bertahun-tahun berprofesi sebagai guru TK. Ibu Dewi yang menyusun buku-buku pedoman tersebut, kalau tidak ada buku maka tidak ada pegangan untuk bunda-bunda. Setelah berjalan, Ibu Dewi juga menyusun kurikulum pembelajaran bagi Pos PAUD Terpadu beserta cara-cara mengajarkannya. Tapi setelah itu tetap dilatih oleh Tim Penggerak PKK dengan adanya Pos PAUD Terpadu percontohan di setiap kecamatan. Gunanya agar Pos PAUD Terpadu percontohan ini agar bisa dicontoh dan dilihat oleh PPT-PPT yang lain. Jadi upaya Tim Penggerak PKK itu sampai sebegitunya tidak hanya membangun, mewajibkan membuat, tapi bertanggung jawab juga sampai kepada pembelajarannya. Untuk itu Tim Penggerak PKK sangat mengharapkan agar Dinas Pendidikan memberikan pembinaan secara edukatif secara mereka berhubungan langsung dengan dunia pendidikan.

Awalnya dulu bunda-bunda Pos PAUD Terpadu itu dilatih dengan menggunakan dana rintisan, tapi hanya diperuntukkan untuk 45 kelompok. Satu kelompok masing-masing mendapatkan dana 5 juta rupiah, tapi tidak berupa uang berupa pelatihan-pelatihan dan APE (Alat Peraga Edukatif). Sekarang juga sudah banyak dana-dana yang diperoleh dari Dinas Pendidikan, jadi persoalan untuk anggaran sudah diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Pendidikan.

Karakteristik bunda-bunda Pos PAUD Terpadu itu mudah dikumpulkan, Tim Penggerak PKK juga memiliki Paguyuban Bunda PAUD di setiap kecamatan. Jadi sudah ada 31 Paguyuban Bunda PAUD di Surabaya karena ada 31 kecamatan. Setiap Paguyuban Bunda PAUD juga ada ketuanya, gunanya agar memudahkan untuk anggota Pokja 2 ini mengontrol kegiatan tersebut. Tim Penggerak PKK ingin agar tercapainya kegiatan ini berjalan dengan baik maka anggota Tim Penggerak PKK berusaha mencari buku untuk pedoman teknis, pegangan, dan tuntunan untuk bunda-bunda. Mencari sampai ke Dinas Pendidikan Nasional Pusat lalu minta ijin untuk digandakan untuk menjadi pegangan para bunda-bunda ini. Agar dapat mengubah pola pikir para orang tua

bahwa sebenarnya anak itu bukan hanya tanggung jawab ibu saja, baik buruknya anak juga dari ibu dan bapak. Anak titipan Allah SWT juga tanggung jawab berdua, diasuh berdua, dan dipintarkan berdua. Untuk itu para orang tua diajak sharing, saling bicara, di Bina Keluarga Balita (BKB).

Selain Tim Penggerak PKK Kota Surabaya sosialisasi ke bawah, membuat buku-buku pedoman dan panduan, sampai pada buku adminitrasi. Setelah Pos PAUD Terpadu itu semakin menjamur hingga jumlahnya mencapai 800-an maka Dinas Pendidikan mulai membuat buku-buku administrasi selain buku-buku pembelajaran. Memang untuk Pos PAUD Terpadu yang baru berdiri itu dianggarkan tahun 2011 saja, karena 2012 tidak dianggarkan oleh pemerintah. Jadi Dinas Pendidikan menangani secara anggarannya saja, padahal Tim Penggerak PKK juga mengharapkan mereka juga menangani secara edukatif. Karena juga tidak mungkin sejumlah Pos PAUD Terpadu yang berjumlah 800-an ini berurusan dengan dinas langsung, untuk itu Tim PKK selalu menyarankan agar mereka berhubungan dengan UPTD saja tiap kecamatan.

Kurikulum dari Dinas Pendidikan untuk Pos PAUD Terpadu berupa menu generic itu sudah ada, namun jika tidak dijabarkan dan diterangkan juga sama saja tidak tahu apa-apa. Kalau tidak diajarkan dan belajar juga tidak bisa. Sebenarnya sangat berat tugas Pemerintah Kota

Surabaya ini dengan adanya Pos PAUD Terpadu, tapi dari pihak Tim Penggerak PKK juga berusaha terus membantu dalam pelaksanaannya, sudah ada muridnya, sudah ada gurunya, tinggal bagaimana gurunya ini diasah kemampuannya dengan ketentuan bunda-bunda PAUD ini harus paling tidak lulusan SMA. Mungkin nantinya juga diprioritaskan harus lulusan sarjana, nah ini tugas siapa tentu tugas pemerintah bukan tugas Tim Penggerak PKK. Karena ada ketentuan bahwa pendidik PAUD itu harus lulusan SMA maka dari pihak Tim Penggerak PKK yang sekarang mengalami kesulitan. Apa mereka harus membuang kader-kader Pos PAUD Terpadu yang lulusan SD atau SMP yang sudah sekian lama mengabdikan pada Pos PAUD Terpadu? Tentu tidak bisa seperti itu. Untuk mengakali hal itu biasanya yang lulusan non SMA hanya mendampingi saja tidak dijadikan pengajar, tapi bunda-bunda yang sudah terlanjur mengajar tapi mereka hanya

lulusan SD atau SMP memiliki kesadaran untuk mengikuti program kejar paket untuk mendapatkan ijazah SMA.

Di tingkat kelurahan ada satu permasalahan yang sering muncul, jadi Pos PAUD Terpadu itu kadang dianggap asset RW. Jadi ketika kepengurusan RW itu ganti maka kepengurusan Pos PAUD Terpadu juga ganti. Masih banyak yang mengalami masalah seperti itu. Kepengurusannya diganti, gurunya diganti, tentu tidak bisa seperti itu karena bunda-bunda Pos PAUD Terpadu sudah dilatih dengan anggaran pemerintah jika begitu saja diganti dengan yang baru tentu tidak bisa. Pos PAUD Terpadu ini hanya kegiatan pembelajaran yang bersifat sosial yang dilaksanakan di desa (RT/RW) atau kelurahan dan bukan merupakan bagian dari lembaga perangkat desa atau kelurahan. Mereka mengira bahwa Pos PAUD Terpadu itu merupakan aset yang menguntungkan dari segi materi, karena mendapat insentif dari pemerintah.

Di daerah pinggiran Kota Surabaya ternyata banyak anak-anak yang mereka sudah selesai PAUD, sudah lulus dari Pos PAUD Terpadu tapi ternyata tidak bisa melanjutkan ke TK karena terkendala biaya. Seperti yang diketahui biaya masuk TK sangat mahal bisa mencapai ratusan ribu rupiah, belum termasuk uang gedung dan lain-lain. Lalu mereka kebanyakan menganggur untuk menunggu masuk SD. Akhirnya banyak Pos PAUD Terpadu terutama di daerah pinggiran yang menerima anak didik yang berusia tidak sesuai dengan ketentuan usia Pos PAUD Terpadu.

Namun dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengungkapkan hal lain. Bahwa sesungguhnya pendidikan itu merupakan tanggung jawab bersama, terutama orang tua. Tetapi Negara juga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut, sesuai dengan fungsi Negara. Dinas Pendidikan mengklasifikasikan PAUD itu ada empat antara lain, Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis. Dan Pos PAUD Terpadu itu masuk dalam kategori Satuan PAUD Sejenis.

Pada awal tercetusnya ide program Pos PAUD Terpadu itu, Dinas Pendidikan tidak begitu terdengar suaranya, bahkan tidak tahu sama sekali. Padahal program tersebut berhubungan dengan pendidikan yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka

sebagai lembaga pemerintah yang menangani pendidikan. Menurut mereka jika suatu kegiatan itu tidak ditangani oleh ahlinya, maka akan cepat juga kegiatan tersebut mengalami kehancuran. Memang program Pos PAUD Terpadu itu berawal dari kepedulian sosial yang menampung anak-anak usia dini kurang mampu yang ingin mengenyam bangku pendidikan sejak dini. Dengan tempat seadanya dan pengajar yang sebenarnya tidak berlatar belakang pendidikan sebagai guru TK. Pengajarnya berasal dari para kader-kader Tim Penggerak PKK Kota Surabaya yang terketuk hatinya memberikan pendidikan dasar tanpa dibayar.

Pada prinsipnya suatu sekolah atau kegiatan pendidikan itu harus memiliki badan hukum. Untuk itu mengapa Dinas Pendidikan terkesan cuek ketika ada suatu program kegiatan Pos PAUD Terpadu yang berhubungan dengan pendidikan mulai bermunculan ibarat jamur di musim hujan. Dikarenakan pada saat itu belum terbit peraturan pemerintah mengenai Pos PAUD Terpadu tersebut. 'Kalau misalnya kegiatan atau program itu tiba-tiba diserahkan pada Dinas Pendidikan, siapa yang akan mengajar? Toh kegiatan tersebut juga belum memiliki badan hukum pada waktu itu. Kegiatan tersebut murni sosial' kata salah satu staff Dinas Pendidikan Kota Surabaya di Bagian PAUD.

Namun ternyata Pemerintah Kota Surabaya menanggapi baik kegiatan tersebut dengan menganggarkan sendiri kebutuhan Pos PAUD Terpadu melalui Anggaran Pembelanjaan Daerah Kota Surabaya. Dan yang mengurus anggaran-anggaran ini adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya, dan seperti yang kita ketahui sebelumnya mereka terkesan cuek. Mulai tahun 2010 telah dialokasikan anggaran sebesar 1.171.885.185, sebelumnya hanya kurang dari 500 juta. Anggaran tersebut juga dialokasikan kepada TK dan Kelompok Bermain, tapi pemerintah memprioritaskan dana untuk Pos PAUD Terpadu harus lebih besar.

Rincian alokasi anggaran untuk Pos PAUD Terpadu tersebut mencapai Rp 1.045.525.530. Rinciannya, Rp 612.697.530 untuk pelatihan, 1.400 tutor atau bunda, pendidik, serta fasilitator kelompok PAUD. 'Kami menganggap bunda-bunda Pos PAUD Terpadu itu ujung tombak kader-kader masa depan. Jadi, mereka harus mendapat banyak pendidikan dan

pelatihan.' Kata staff Dinas Pendidikan di bidang PLS. Selain itu, anggaran digunakan untuk pengadaan 1173 set alat peraga edukatif (APE) PAUD senilai Rp 387.090.000 dan Rp 45.738.000 untuk pengadaan 600 eksemplar modul Pendidikan Anak Usia Dini. Dinas Pendidikan berusaha untuk melengkapi sarana dan prasarannya.

Alokasi anggaran tersebut tidak termasuk honor para bunda-bunda Pos PAUD Terpadu. Saat ini, memang baru sekitar 700 bunda saja yang mendapat dana insentif. Padahal, jumlah bunda PAUD mencapai 4.128 orang. Insentif mereka pun tidak banyak. Masing-masing bunda hanya menerima Rp 25 ribu rupiah per bulan. Dinas Pendidikan ingin menghargai para bunda-bunda. Sebab, mereka mengajar dengan ikhlas dan tidak mungkin mau, kalau mereka bekerja hanya demi uang.

Selama ini kesejahteraan bunda PAUD memang masih cukup memprihatinkan. Karena itu, sangat mungkin hal tersebut menjadi salah satu penyebab belum banyaknya orang yang mau mengabdikan di Pos PAUD Terpadu. Hanya mereka yang peduli terhadap pendidikan anak sejak dini itulah yang terpenggil. Namun, tidak berarti pemerintah kota menutup mata. Pemerintah Kota akan berusaha membuat pengajuan kenaikan di tahun depan. Namun yang terpenting saat ini adalah meningkatkan kualitas para bunda-bunda. Sebab saat ini sebagian besar bunda Pos PAUD Terpadu adalah ibu rumah tangga. Karena itu, Pemerintah Kota mengalokasikan anggaran besar untuk program pelatihan dan pendidikan untuk mereka. 'Anak-anak usia dini itu kan peka. Kalau mengajarnya salah juga bisa berakibat fatal. Karena itu, SDM (sumber daya manusia) para bunda harus terus diolah' kata Bapak Dariyanto dari Dinas Pendidikan.

Ada banyak pelatihan yang telah diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Di antaranya, seminar, kursus, serta diklat cara-cara mengajar yang baik dan benar. Tentu saja dengan menghadirkan pembicara yang berkompeten. Mulai dosen hingga psikolog. Hal tersebut dilakukan agar bunda-bunda Pos PAUD Terpadu lebih bisa memahami psikologis anak kecil. Pelan-pelan masyarakat mulai merasakan manfaatnya. Hal itu bisa dilihat dari jumlah anak didik di Pos PAUD Terpadu yang semakin lama makin bertambah. Jika dirata-rata setiap pos PAUD

Terpadu mendidik 30-60 anak, total yang tercover mencapai 18 ribu-37 ribu anak. 'Sejak muncul beberapa tahun lalu, jumlah Pos PAUD Terpadu memang semakin banyak. Pos PAUD Terpadu itu sangat membantu dan memfasilitasi pendidikan siswa kalangan menengah ke bawah,' tegas Pak Dariyanto.

Jika dikaitkan dengan teori New Public Service sebenarnya program Pendidikan Anak Usia Dini – Pos PAUD Terpadu (PAUD-PPT) adalah tuntutan dan respon dari masyarakat itu sendiri. Sebegitu pentingkah Pendidikan Anak Usia Dini itu bagi generasi penerus mereka. Seharusnya instansi-instansi pemerintah, kelompok-kelompok paguyuban hanya memusatkan tanggung jawab bagaimana melayani dan memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan organisasi seperti Pos PAUD Terpadu dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah yang telah diterbitkan. Namun belakangan ini ada intervensi politik didalamnya, seperti pembuatan kebijakan yang terkesan lambat sebagai instrument pencitraan politik. Ketika Pos PAUD Terpadu itu sudah mulai menjamur, mulai booming dan diminati, dibawah asuhan dan kendali Tim Penggerak PKK Kota Surabaya beserta paguyuban bunda-bunda PAUD, saling koordinasi juga dengan Bapemmas dan KB maka melahirkan sebuah peraturan walikota di tahun 2008. Padahal kegiatan tersebut sudah ada sejak 2004 yang lalu.

Keikutsertaan masyarakat dan kepedulian masyarakat terhadap Pendidikan Anak Usia Dini itu tercermin pada kader-kader Tim Penggerak PKK Kota Surabaya dan anggota-anggota Paguyuban bunda-bunda PAUD se-Surabaya. Semata-mata bukan untuk kepentingan pribadi, karena jiwa sosial mereka yang tinggi dan kepedulian mereka kepada anak-anak di Kota Surabaya yang tidak dapat bersekolah di pendidikan sejak dini. Mereka bertindak secara bersama-sama demi mencapai tujuan yang lebih baik dan kepentingan bersama.

Dalam perspektif new public service peran penyelenggara layanan public dalam kasus ini adalah pemerintah harus melibatkan masyarakat. Karena mereka harus menyadari tanggung jawab, etika dan akuntabilitas dalam suatu sistem yang demokrasi ini. Pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam hal ini orang tua para anak-anak usia dini guna

perencanaan dan pelaksanaan program, dengan itu sudah ada kewenangan lembaga pemerintah yang menanganinya yaitu Bapemmas dan KB. Selain untuk tercapainya koordinasi dan pemerintahan yang lebih baik juga sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian pekerjaan lembaga-lembaga pemerintah

tidak lagi mengarahkan atau memanipulasi insentif tetapi pelayanan kepada masyarakat, meskipun masih ada juga lembaga pemerintah yang seperti itu.

Seperti yang kita ketahui bahwa peraturan walikota nomor 20 tahun 2008 yang mengatur tentang pelayanan Pos PAUD Terpadu baru terbit di tahun 2008, dan di kala itu peraturan tersebut masih dalam kepemimpinan walikota Bambang Dwi Hartono. Tetapi anggaran dari pemerintah pertama kali baru dianggarkan untuk Pos PAUD Terpadu di tahun 2010 setelah Surabaya dibawah kepemimpinan walikota yang baru Ibu Tri Rismaharini. Motif pencitraan politik sangat terasa sekali disini. Segala bentuk anggaran dan dana-dana untuk Pos PAUD Terpadu baru muncul di tahun 2010, bahkan ada pula dana-dana itu bersifat sementara dengan kata lain macet ditengah jalan.

Kepemimpinan walikota Surabaya yang baru Tri Rismaharini tetap masih mengusung Bambang Dwi Hartono sebagai wakil walikota Surabaya untuk masa periode jabatan 2010-2015. Pencitraan politik itu dilakukan bagaimana agar kekuasaan itu tetap lestari. Politik pencitraan itu bekerja secara efektif melalui bahasa, tindakan, cara berpikir, cara berbicara, bahkan gaya hidup. Dan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan sarana yang efektif untuk hal tersebut karena mereka masih didominasi oleh ketidaktahuan.

Mengelontorkan sejumlah anggaran khusus untuk Pos PAUD Terpadu yang disaat itu seperti jamur di musim hujan yang hampir menyebar di seluruh kecamatan di Kota Surabaya. Selain untuk kesuksesan program pendidikan di Kota Surabaya tentu juga untuk kepentingan kelestarian kekuasaan pemerintah sendiri. Karena disini sasaran anaknya tentu untuk mencerdaskan anak-anak di Kota Surabaya generasi Kota Surabaya yang lebih baik, dan sasaran utamanya juga pasti para orang tua agar lebih mudah menjangkau dan menerima segala bentuk sosialisasi politik.

Setelah dana-dana untuk Pos PAUD Terpadu dianggarkan, pemerintah harus

memberi tanggung jawab pengelolaan dana kepada siapa? Kepada Tim Penggerak PKK yang sedari awal gencar-gencarnya melaksanakan program Pos PAUD Terpadu, tentu saja tidak. Dana itu diberikan kepada lembaga pemerintah yang menangani masalah pendidikan yaitu Dinas Pendidikan. Yang sedari awal Dinas Pendidikan itu terkesan tidak mau tahu, setelah pemerintah memberikan kewenangan kepada mereka untuk mengelola dana Pos PAUD Terpadu tersebut mereka baru turun tangan. Tentu ada kepentingan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Berarti sama artinya mereka tidak mau bekerja tanpa adanya anggaran, mereka bekerja bukan dalam rangka sosial, padahal sesungguhnya yang namanya pendidikan itu sangat dekat dengan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.

Dinas Pendidikan Kota Surabaya menyambut baik program Pos PAUD Terpadu ini, karena dari anggaran pemerintah kota Surabaya untuk PAUD, anggaran Pos PAUD Terpadu yang paling besar nominalnya. Sebelum adanya Pos PAUD Terpadu Dinas Pendidikan hanya menerima anggaran untuk PAUD hanya berjumlah sedikit karena dikhususkan untuk TK dan Kelompok Bermain. Kepentingan Dinas Pendidikan Surabaya ini adalah bagaimana mereka mampu mengelola dana yang begitu besarnya, maka mereka pun dapat bekerja secara optimal tanpa manipulasi.

Ketika saya menemui bunda-bunda PAUD yang sedang mengambil dana insentif sebesar 50 ribu rupiah per bulan, kebetulan ketika wawancara, sedang berlangsung pembagian dana insentif di Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Mereka mengaku tidak menerima dana insentif sepenuhnya, melainkan dipotong 10 ribu rupiah untuk pajak. Diterimakan setiap 6 bulan dengan nominal 300 ribu rupiah tapi mereka masih harus dikenai pajak 10 ribu rupiah. Tetapi masih belum diketahui pajak itu untuk siapa, untuk pemerintah atau Dinas Pendidikan. Tetapi indikasi memang itu peraturan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya itu sendiri.

Selain itu menurut analisis saya Bapemmas dan KB dalam penyelenggaraan Pos PAUD Terpadu ini juga memiliki kepentingan sendiri, yaitu untuk mensukseskan program mereka yang sempat mati suri. Agar suatu program itu mendapat suntikan dana dari pemerintah, maka program itu harus berjalan dulu, dan program

itu membawa perubahan bagi masyarakat Kota Surabaya. Sebelum adanya dana dari pemerintah program dari Bapemmas dan KB sudah mati suri duluan, maka mereka mengambil inisiatif bagaimana agar program tersebut bangkit lagi yakni dengan cara mengintegrasikannya dengan program Pos PAUD Terpadu tersebut.

Jika menganut pada prinsip-prinsip new public service seperti prinsip melayani masyarakat, bukan customer maka masyarakat Kota Surabaya mempunyai hak dan kewajiban dalam perencanaan dan pelaksanaan program Pos PAUD Terpadu. Masyarakat juga berhak menerima dan menggunakan pelayanan atau mengikuti program yang sudah didanai oleh pemerintah Kota Surabaya ini. Maka pemerintah kota Surabaya akan lebih bisa membangun kepercayaan dan kolaborasi terhadap masyarakat Surabaya.

Pemerintah juga bukan actor utama dalam merumuskan apa yang menjadi kepentingan bersama. Seperti program Pos PAUD Terpadu ini justru actor utama perumusan program ini dari Tim Penggerak PKK Kota Surabaya didukung oleh kader-kader PKK seluruh Kota Surabaya dan paguyuban bunda-bunda PAUD di Surabaya. Tim Penggerak PKK Kota Surabaya ini yang menjadi actor penting mengartikulasikan kepentingan public. Masyarakat berhak merencanakan dan memilih suatu program yang memang menjadi kebutuhan dan tujuan bersama yang itu merupakan suatu tahapan dalam proses pemerintahan, jadi warga masyarakat tidak dilibatkan dalam pemilihan umum saja mereka juga perlu difasilitasi.

Kepentingan bersama itu akan lebih baik jika dijalankan oleh keterlibatan masyarakat dan dirumuskan serta dikembangkan oleh aparatur Negara. Pos PAUD Terpadu ini memandang keterlibatan antara bunda-bunda PAUD dari masyarakat dan aparatur Negara yaitu Tim Penggerak PKK, Bapemmas dan KB, Dinas Pendidikan. Mereka seharusnya bersama-sama memiliki komitmen untuk memberi sumbangan berarti kepada kehidupan bersama, bukan semata-mata berlandaskan kepentingan dan kekayaan public. Disini kita melihat relasi antara pemerintah Kota Surabaya dan masyarakat Surabaya bagaimana pemerintah itu menjalankan fungsi-fungsi controlling dan fasilitasi. Lembaga-lembaga pemerintah yang mengelola pelaksanaan Pos PAUD Terpadu yang

sesuai dengan fungsi pemerintah sebagai fasilitator. Dan relasinya didapatkan bagaimana lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat itu memecahkan masalah yang muncul. Karena yang kita tahu Pos PAUD Terpadu di Surabaya itu banyak sekali.

Keterlibatan masyarakat dilihat sebagai bagian yang harus ada dalam implementasi kebijakan. Jadi masyarakat Surabaya juga dituntut untuk terlibat dalam keseluruhan tahapan perumusan dan proses implementasi kebijakan. Jika dilihat dari sejarah awal dimulai pelaksanaan Pos PAUD Terpadu, masyarakat Surabaya sangat antusias sekali dalam program ini. Hingga mengapa banyak sekali pos-pos PAUD bermunculan hingga menyebar di seluruh kecamatan yang ada di Surabaya. Melalui proses tersebut, masyarakat akan terlibat dalam proses pemerintahan dan bukan hanya menuntut pemerintah untuk memuaskan kepentingannya saja. Melalui Pos PAUD Terpadu ini menjadi ruang dimana masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintah dengan perspektif yang berbeda bertindak bersama demi kebaikan bersama. Interaksi dan keterlibatan masyarakat ini yang menjadi tujuan dan makna pelayanan public.

Penyelenggaraan program Pos PAUD Terpadu itu bukan wirausaha atau bisnis dimana konsekuensi kegagalannya akibat keputusan yang diambil akan ditanggung sendiri oleh pihak yang menyelenggarakan. Resiko atas kegagalan suatu implementasi kebijakan suatu program akan ditanggung oleh semua masyarakat. Karena memang penyelenggaraannya juga berawal dari masyarakat. Namun akuntabilitas lembaga-lembaga pemerintah bersifat kompleks dan multifacet seperti pertanggungjawaban kinerja, legal, politis, dan demokratis.

Kepemimpinan ditujukan untuk kemanfaatan kemanusiaan. Kepemimpinan transaksional digerakkan atas dasar motif timbal balik atau saling menguntungkan antara pimpinan dan pengikut, atasan dan bawahan. Kepemimpinan moral atau transformasional adalah kepemimpinan yang mampu menjadi aspirasi dan keteladanan moral baik bagi pimpinan, bawahan, maupun publik secara keseluruhan. Kepemimpinan moral menghasilkan tindakan yang konsisten dengan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi pengikut maupun tindakan-tindakan yang secara funda-

mental merubah moral dan kondisi sosial. Pada akhirnya kepemimpinan ini mempunyai kapasitas untuk menggerakkan kelompok, organisasi, dan masyarakat menuju pencapaian tujuan yang lebih tinggi. Yang terjadi dalam Pos PAUD Terpadu ini bagaimana kepemimpinan moral atau transformasional itu dilakukan. Kepemimpinan Tim Penggerak PKK yang berusaha untuk menggerakkan kader-kadernya agar mewajibkan penyelenggaraan Pos PAUD Terpadu. Serta menggerakkan kelompok-kelompok paguyuban bunda-bunda PAUD agar lebih peduli lagi dan ikhlas mengajar tanpa dibayar. Dalam Tim Penggerak PKK juga terdapat pola kepemimpinan shared leadership dimana kendali program tidak terpusat pada atasan melainkan melibatkan banyak kelompok seperti kader-kader, kelompok paguyuban, tentu sebagai pelayan public dan mengabdikan kepada masyarakat.

New public service tidak melihat manusia yang mementingkan dirinya sendiri. Perilaku manusia juga didorong oleh faktor martabat manusia (human dignity), rasa memiliki dan dimiliki (belongingness), perhatian pada orang lain, pelayanan, dan kepentingan bersama. Kinerja Tim Penggerak PKK tidak boleh dipandang sebelah mata, mereka bekerja didasari atas nilai-nilai sosial dan kepedulian, kader-kader PKK, bunda-bunda PAUD, mereka semua secara ikhlas mengabdikan kepada Negara untuk pembentukan generasi penerus yang lebih baik. Bukan hanya bekerja karena menginginkan nilai-nilai ekonomi semata, seperti yang terjadi pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Hambatan dalam realisasi kepentingan Pemerintah Kota Surabaya terhadap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini – Pos PAUD Terpadu (PAUD - PPT)

Yang menjadi hambatan dalam realisasi kepentingan pemerintah Kota Surabaya terhadap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini – Pos PAUD Terpadu adalah jika keberadaan program ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk mewujudkan kepentingannya. Seperti yang terjadi di salah satu Pos PAUD Terpadu di kelurahan Klampis Ngasem. Pada saat pemilihan calon legislative kemarin, ada salah satu calon yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan sumbangan berupa mainan

ayunan, mandi bola, perosotan kepada Pos PAUD Terpadu tersebut. Lalu calon tersebut juga mengundang para orang tua wali murid untuk hadir dalam pertemuan singkat yang mungkin itu bisa diartikan sebagai kampanye.

Tanggapan dari Tim Penggerak PKK mereka justru menganjurkan agar Pos PAUD Terpadu itu bisa menerima dan mencari bantuan dari siapa saja, karena semata-mata menginginkan Pos PAUD Terpadu tumbuh dan berkembang dengan sehat, persoalan kepentingan elite tersebut itu tergantung dari hati nurani wali murid masing-masing, mau memilih dia atau tidak. Itu juga salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Dan di Surabaya hampir semua Pos PAUD Terpadu itu dijadikan alat kepentingan politik partai maupun elite politik.

Seperti calon legislative waktu itu Bapak Armuji dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memberikan bantuan kepada setiap Pos PAUD Terpadu di kecamatan Wonokromo sebesar 5 juta rupiah. Tapi memang hal tersebut tidak bisa dilarang dan dihindari karena keadaan Pos PAUD Terpadu di Surabaya juga masih banyak yang memprihatinkan dan perlu mendapatkan bantuan. Lembaga-lembaga pemerintah yang menangani Pos PAUD Terpadu juga tidak bisa berbuat banyak, mereka menyerahkan semuanya kepada Pos PAUD Terpadu masing-masing, mereka mau menerima atau tidak asalkan bantuan tersebut tidak mengikat.

Pos PAUD Terpadu di Surabaya justru menyambut baik jika ada pihak ketiga seperti itu, seperti contohnya lagi di Kecamatan Gayungan. Seluruh Pos PAUD Terpadu di kecamatan Gayungan dibantu oleh Perusahaan listrik Jawa-Bali, dibantu mulai dari seragam, alat peraga edukatif. Dan hasilnya Pos PAUD Terpadu di kecamatan Gayungan bagus, seragamnya sama semua. Karena dari PKK dan Dinas Pendidikan tidak ada dana untuk itu. Dari universitas-universitas juga seperti Universitas Adibuana Surabaya. Bagi mahasiswa-mahasiswa yang kuliah kerja nyata itu pasti mereka banyak memberikan bantuan, entah itu mengecat tembok, memberikan kipas angin, karpet, gambar-gambar dinding untuk anak-anak.

Selain itu juga diharapkan agar bunda-bunda Pos PAUD Terpadu itu kreatif. Bagaimana agar dapat memperoleh bantuan dana. Seperti di Pos PAUD Terpadu Kedung Cowek,

kondisinya sangat memprihatinkan, bahkan bunda-bundanya banyak yang tidak mengetahui bagaimana agar bisa mendapat bantuan dana dari pihak lain. Karena kalau hanya menunggu dari pemerintah memang tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu para bunda-bunda Pos PAUD Terpadu dituntut harus kreatif.

Dan Pendidikan Anak Usia Dini sudah menjadi komoditi kepentingan politik dan alat kepentingan dari berbagai pihak. Dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan fungsi pendidikan. Karena karakteristik PAUD lebih mudah dijangkau dan dikumpulkan. Menembak dari anaknya tapi sebenarnya yang menjadi sasaran utama adalah orang tuanya.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya

Mengetahui hal tersebut seharusnya pemerintah Kota Surabaya lebih peka, bahwa ternyata dana yang mereka anggarkan untuk Pos PAUD Terpadu itu masih belum bisa menjangkau keseluruhan kegiatan tersebut. Dukungan dari lembaga pemerintahan tingkat desa seperti RT atau RW itu penting, karena mereka penguasa setempat. Mereka bisa mengumpulkan warganya untuk melihat Pos PAUD Terpadu di daerahnya itu seperti apa. Lalu memikirkan bersama solusinya ini bagaimana. Dijelaskan juga pentingnya Pendidikan anak tersebut karena kebanyakan mereka banyak yang tidak tahu. Pos PAUD Terpadu ini tempat anak itu bermain sambil belajar, mengapa bermain sambil belajar untuk mengasah otaknya untuk tumbuh kembang.

Upaya lain yang seharusnya diambil, adalah meningkatkan kualitas dan anggaran pendidikan, untuk itu dana pendidikan harus diorientasikan untuk membiayai pelaksanaan pendidikan, dan bukan untuk keperluan manajemen dan lain-lain di luar itu. Pelaku pendidikan hanyalah dua, yaitu guru dan murid. Maka dana besar yang dikeluarkan oleh pemerintah, semestinya untuk membiayai kegiatan itu bukan untuk yang lain-lain. Sementara kenyataannya orang lebih menyukai terlibat menjadi pengurus pendidikan, pejabat pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan daripada menjadi pelaku pendidikan, yaitu guru atau pendidik.

Untuk meraih keunggulan produk pendidikan tidak perlu diorientasikan agar

pendidikan berbiaya murah. Tidak mengapa pendidikan berbiaya mahal, asalkan seluruh masyarakat tidak ada yang terhalang menyekolahkan anaknya di pendidikan anak usia dini hanya karena tidak mampu membayarnya. Biaya pendidikan mahal memang sebuah keniscayaan untuk meraih keunggulan. Tidak pernah ada keunggulan diraih dengan biaya murah. Hanya persoalannya, biaya mahal itu harusnya dipikul oleh pemerintah atau lembaga lainnya sebagai penyedia anggaran. Pendidikan berkualitas yang mahal itu harus dapat dijangkau oleh siapapun.

Terakhir Pendidikan Anak Usia Dini tidak boleh didekati dengan cara terlalu formal, hingga melahirkan formalitas. Pendidikan adalah proses yang melibatkan aspek-aspek yang sedemikian luas, terkait dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu dalam dunia pendidikan khususnya pada Pendidikan Anak Usia Dini harus ditumbuh kembangkan iklim yang memungkinkan manusia tumbuh dan berkembang secara utuh, berkelanjutan, tahap demi tahap untuk meraih kesempurnaan.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Politik Pendidikan: Studi Tentang Pendidikan Anak Usia Dini – Pos PAUD Terpadu (PAUD – PPT) Kota Surabaya, maka saya dapat menyimpulkan antara lain:

Pertama, kepentingan yang dibawa Pemerintah Kota Surabaya terhadap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini – Pos PAUD Terpadu (PAUD – PPT) lebih bersifat kepada kepentingan politik. Strategi pelestarian kekuasaan mantan walikota Surabaya Bambang DH melalui pencitraan politik dengan memberikan anggaran khusus untuk PAUD – PPT di periode 2010-2015 ketika pencalonan Risma-Bambang. Padahal diketahui program itu telah ada sejak 2004 dan peraturan pemerintah kota Surabaya tentang Pendidikan Anak Usia Dini – Pos PAUD Terpadu (PAUD-PPT) dibuat tahun 2008. Kepentingan lembaga pemerintah seperti Dinas Pendidikan. Bahwa pendidikan itu harusnya menjadi ruang kerja mereka, namun mereka justru terkesan cuek. Setelah kegiatan PAUD-PPT itu dianggarkan sendiri, digelontor dana jutaan rupiah mereka seolah-olah yang paling berhak untuk bertanggung jawab dalam program tersebut.

Kedua, hambatan yang dihadapi pemerintah dalam merealisasikan kepentingannya itu adalah jika ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan program Pendidikan Anak Usia Dini – Pos PAUD Terpadu (PAUD – PPT) sebagai alat kepentingan politik dengan memobilisasi dukungan politik. Calon legislative dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memanfaatkan Pos PAUD Terpadu (PPT) di salah satu kelurahan dengan menyumbangkan IV.2 mainan, lalu mendatangkan para wali murid untuk mencari dukungan dalam pemilu legislative. Berikutnya Perusahaan listrik Jawa-Bali yang mendanai Pos PAUD Terpadu di kecamatan Juwangan. Intervensi pihak-pihak lain merupakan hambatan tersendiri bagi pemerintah Kota Surabaya untuk merealisasikan maksud dan kepentingannya.

Ketiga, upaya yang harus dilakukan Pemerintah Kota Surabaya adalah meningkatkan kualitas dan anggaran Pendidikan Anak Usia Dini – Pos PAUD Terpadu (PAUD-PPT), dana pendidikan yang dianggarkan seharusnya berjalan dengan intensif. Agar Pos PAUD Terpadu itu tidak dijadikan komoditi atau kepentingan oleh berbagai pihak. Anggaran Pos PAUD Terpadu harus diorientasikan untuk membiayai pelaksanaan program pendidikan itu, bukan untuk keperluan manajemen dan keperluan program lain-lain di luar itu. Pelaku pendidikan hanyalah dua, yaitu guru dan murid. Maka dana besar yang dikeluarkan oleh pemerintah, semestinya untuk membiayai kegiatan itu bukan untuk yang lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Siti dkk. 2007. *Perkembangan dan Konsep Dasar Pengembangan Anak Usia Dini*. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Daulay, Haidar Putra. 2007. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan di Indonesia*. Prenada Kencana. Jakarta.
- Denhardt, J.V. dan Denhardt, R.B. 2004. *The New Public Service: Serving, Not Steering*. M.E. Sharpe. New York.
- Harrison, Lisa. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Kencana Pernada Media Group,

- Jakarta.
- Hariwijaya, Muhammad dan Bertiani Eka Sukaca. 2011. *PAUD: Melejitkan Potensi Anak dengan Pendidikan Sejak Dini*. Mahadhika Publishing. Yogyakarta.
- Masitoh, dkk. 2005. *Strategi Pembelajaran TK*. Jakarta.
- Mantra, Ida Bagus. 2004. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Nata, Abuddin. 2008. *Manajemen Pendidikan; Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Seefeldt, Carol dan Barbara. A. Wasik. 2008. *Pendidikan Anak Usia Dini: Menyiapkan Anak Usia Tiga, Empat, Lima Tahun Masuk Sekolah*. PT. Indeks. Jakarta.
- Sirozi, Muhammad. 2005. *Dinamika Hubungan Antara Kepentingan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Sujiono, Yuliani Nurani. 2009. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. PT Indeks. Jakarta.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- S Soetopo, Hendyat. 2005. *Pendidikan dan Pembelajaran (Teori, Permasalahan, dan Praktek)*. Malang : UMM Press.
- Muhammad Noor. 1984. *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan*. Usaha Nasional. Surabaya.
- Yuliani, Sri. 2007. *Mewujudkan Birokrasi Yang Pro-Citizen (Review Paradigma New Public Service)*. Jurnal Ilmu Administrasi FISIP UNS. Vol. 3 No.1. Solo.
- Lampiran Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2003 Tanggal 15 Mei 2008
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: 2003
- www.psp.kemdiknas.go.id
- <http://litbang.kemdiknas.go.id>
- <http://jdih.surabaya.go.id-perwali-no.20:2008>
- www.kompasiana.com